



KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SENIN, 28 OKTOBER 2019

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Masalah Lapter Tak Tuntas

KOTA MANNA, BE " Warga Desa Pagar Dewa Kota Manna sangat berharap kepada Bupati Bengkulu Selatan (BS), Gusnan Mulyadi SE MM dan Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah MMA untuk segera menuntaskan masalah lapangan terbang (Lapter) dua yang saat ini diakui pihak TNI AU sebagai aset mereka. Padahal khusus di Desa Pagar Dewa Kota Manna sudah didiami warga sebelum adanya klaim tersebut.

"Saat ini kami percayakan kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati menuntaskannya. Namun jika tidak, warga siap menemui Presiden,"

kata Zairin Mulyadi, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Pagar Dewa Kota Manna.

Mantan Kepala Desa Pagar Dewa dua periode tersebut mengatakan, untuk mencari solusi masalah lahan tersebut, sebelumnya pihaknya sudah bertemu dengan Gubernur Bengkulu. Bahkan data yang diminta Pak Gubernur juga sudah disampaikan. Oleh karena itu, dirinya berharap, dalam tahun ini masalah lapter tersebut selesai.

"Setiap warga kami mau membangun rumah, selalu dihalangi, alasan harus minta izin dahulu dengan pihak TNI AU. Padahal lahan tersebut milik kami yang turun temurun dari nenek moyang kami, saat ini warga kami siap sumbangan untuk biaya menemui Presiden," ujarnya.

Kabid Aset BPKAD BS, Syahrial S Sos mengatakan, masalah aset Pemda BS yang dibangun di atas lapter dua selalu menjadi temuan BPK. Sehingga menjadi

penghalang BS meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan upaya untuk mendapatkan lapter tersebut sudah dilakukan sejak Bupati BS, H Reskan Effendi Awaludin SE. Namun hingga saat ini belum juga tuntas.

"Sebelumnya sudah ada pertemuan dengan Pak Gubernur, semoga pak Gub dapat menyelesaikan masalah lapter tersebut," ujarnya.

Sebab, sambung Syahrial, selama ini Pemda BS melaksanakan pembangunan di atas lapter tersebut hanya berdasarkan adanya perjanjian pinjam pakai dengan pihak TNI AU. Sedangkan masa pinjam pakai hanya sampai 5 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang lagi. "Ya kalau pihak TNI AU mau memperpanjang masa pinjam pakai, kalau tidak tentu aset BS di atas lapter tersebut harus dipindahkan. Oleh karena itu, semoga nanti pihak TNI AU bisa menghibahkan lapter dua ke Pemda BS," harap Syahrial. (369)